

## **BAB I**

### **PEDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kemiskinan di Indonesia bukanlah hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara tetangga maupun di Asia. Berbagai macam Program yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan di negara ini, namun hal ini tidak seperti yang kita harapkan. Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara – negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Edi Suharto (2009:16) mengungkapkan pengertian kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidak berdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, baik maupun akibat ketidak mampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan social kepada warganya.

Kemiskinan merupakan masalah yang begitu kompleks, hal ini dikarenakan ketidakmampuan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Selain itu, kemiskinan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi program utama disetiap pemerintahan. Layaknya menjadi fokus utama, pemerintah melakukan berbagai macam upaya dalam menekan angka kemiskinan yang ada. Intervensi melalui kebijakan dilakukan secara bervariasi, baik berupa bantuan langsung secara tunai, bantuan fisik berupa barang, serta melalui pemberdayaan masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang selanjutnya dapat mempengaruhi atau mengganggu tingkat kesejahteraan hidupnya.

Salah satu penyebabnya adalah karena pendapatan tidak tetap, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat

miskin, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar , artinya mereka memiliki rumah tidak layak huni.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan social. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara social dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Perumahan dan pemukiman, selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan persemaian budaya atau sistim nilai. Salah satu wujud kesejahteraan masyarakat dapat ditandai dengan meningkat-nya kualitas kehidupan yang layak.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan tridaya yaitu pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga pendekatan

ini diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan permukiman mereka.

Disamping itu upaya lainnya yang juga dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, kredit pemilikan rumah/ KPR bersubsidi, maupun pengembangan perumahan swadaya. (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005: 59).

Berbagai kebijakan tersebut di atas, belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan dalam mengatasi keterbatasan akses, mutu, dan kepemilikan perumahan dan permukiman sehat bagi masyarakat miskin. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Beberapa kendala dihadapi dalam melaksanakan program-program yang pernah diluncurkan tersebut, belum tersedianya data perumahan dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat miskin.

Dalam menentukan penerima Rumah Layak Huni tersebut, calon-calon penerima harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kantor Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Rumah Layak Huni yang terbangun Pada Tahun 2016 berjumlah

39 Unit, 39 Unit tersebut terbagi dalam beberapa Kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Timur, yaitu Kelurahan Padebuolo, ipilo, moodu, tamalate, heledulaa selatan, heledulaa utara.

**Tabel 1.1**  
**DATA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI**  
**KECAMATAN KOTA TIMUR**  
**KOTA GORONTALO**

<b>NO</b>	<b>NAMA KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH MAHAYANI BELUM TERBANGUN</b>	<b>JUMLAH MAHAYANI TERBANGUN</b>
1	KELURAHAN PADEBUOLO	20 UNIT	2 UNIT
2	KELURAHAN HELEDULAA UTARA	19 UNIT	3 UNIT
3	KELURAHAN TAMALATE	20 UNIT	4 UNIT
4	KELURAHAN MOODU	15 UNIT	7 UNIT
5	KELURAHAN HELEDULAA SELATAN	14 UNIT	17 UNIT
6	KELURAHAN IPILO	17 UNIT	6 UNIT
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>105 UNIT</b>	<b>39 UNIT</b>

Sumber data :Kecamatan Kota Timur

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kantor Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bahwa jumlah Rumah Layak Huni yang terbangun yaitu 39 Unit sedangkan Rumah Layak Huni Belum terbangun 105 Unit. Hal ini yang menjadi permasalahan peneliti apakah ada fungsi pengendalian pada penerima program Rumah Layak Huni?

Dengan hasil observasi data ini maka peneliti merasa tertarik untuk lebih fokus meneliti dengan judul penelitian “ **Fungsi Pengendalian Penerima Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Kota Timur** ”.

## **1.2 Fokus / Sub Fokus**

Dalam penelitian, peneliti mengidentifikasi fokus penelitian berdasarkan hasil observasi pada objek penelitian adalah “ Bagaimana Fungsi Pengendalian Penerima Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Kota Timur “.

Dengan sub fokus yang terdiri dari :

- a. Menetapkan Standar :
  1. Kriteria Penerima
  2. Penetapan Standar
  3. Pelaksana Program
  4. Sasaran Program
- b. Mengukur Kinerja
  1. Ketetapan Sasaran Penerima
  2. Proses Pengukuran Kinerja
- c. Mengambil Tindakan Perbaikan
  1. Pelaporan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
  2. Bentuk-Bentuk Penilaian dari Kecamatan
  3. Kesesuaian Pelaksana Program

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Pengendalian apa saja yang ada pada Masyarakat Penerima Rumah Layak Huni Di Kantor Kecamatan Kota Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis akan memperoleh wawasan yang lebih luas terhadap permasalahan secara ilmiah, juga untuk mengetahui Fungsi Pengendalian apa saja yang ada pada Masyarakat Penerima Rumah Layak Huni Di Kantor Kecamatan Kota Timur .

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan untuk judul serta masyarakat umum dalam Fungsi Pengendalian apa saja yang ada pada Masyarakat Penerima Rumah Layak Huni Di Kantor Kecamatan Kota Timur. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pada kajian penelitian untuk konsentrasi yang sama yang dilakukan selanjutnya.